



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 29 April 2021

Halaman: 2

KEJAKSAAN

Tak Ada TP4D, Tetap Kawal Proses Pembangunan

JOGJA, Radar Jogja – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja menggelar sosialisasi peran dan tugas Kejaksaan Negeri dalam Pembangunan Kota Jogja kemarin (27/4). Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar luring terbatas dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kemantren, dan Lurah se-Kota Jogja.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Jogja Sugeng Riyadi menuturkan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang peran kejari dalam pembangunan di daerah. "Khususnya Kejari Kota Jogja dalam pembangunan di Kota Jogja kepada para pejabat lingkungan pemerintahan," tuturnya.

Selama ini, jelas dia, Kejari Kota Jogja sudah membantu Pemkot Jogja dalam mengawal penegakkan peraturan daerah. Termasuk dalam penegakan pembangunan daerah. Menurut dia, walaupun sudah tidak ada TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah), pihaknya tetap melakukan pengawalan agar pembangunan berjalan sukses. "Misal dalam pengadaan kontrak bagaimana jangan sampai ada permasalahan hukum dan dalam pelaksanaan jangan sampai ada KKN," jelas Sugeng.

Sedang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jogja Nindyo Dewanto berharap melalui kegiatan ini seluruh OPD dapat memahami tugas, fungsi dan wewenang peran Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara. "Kejaksaan, juga dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, pelayanan hukum perdata dan tata asaha negara di instansi lembaga," ungkapnya.

Menurut Nindyo, selama ini masyarakat mengenal kejaksaan hanya sebatas sampai penyidik dan penegak hukum di pengadilan. Tapi fungsi dari Kejaksaan sebenarnya lebih kompleks. Tugas dan wewenang kejaksaan setidaknya memiliki tiga, yaitu di bidang pidana, bidang perdata, tata usaha negara dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Nindyo menambahkan, dengan masa pandemi yang membuat seluruh kinerja instansi pemerintah dibatasi dengan protokol kesehatan, OPD dituntut kreatif tanpa keluar dari aturan. Hal itu juga tidak lepas dari Kejari dalam mengawasi jalannya pemerintahan. "Sehingga dapat terwujud birokrasi tertib hukum, untuk pembangunan daerah Kota Jogja," harapnya. (cr1/prg/rg)

☐ Negatif ☐ Amat Sedera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005